

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di negara yang menerapkan sistem demokrasi, partisipasi politik menjadi sangat dibutuhkan agar semua elemen masyarakat dapat berperan dan menyuarakan kepentingan mereka sehingga dapat terwujud atau setidaknya mendapat perhatian dari pemerintah. Dengan adanya partisipasi politik dari seluruh elemen masyarakat, maka hal tersebut menunjukkan adanya modernisasi politik dalam suatu negara. Dalam tradisi masyarakat tradisional, keterlibatan masyarakat dalam suatu negara guna mempengaruhi pengambilan keputusan serta mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil, dan lebih ditentukan hanya kelompok elit penguasa saja (Huntington dan Nelson, 1994). Masyarakat dalam suatu negara yang terdiri dari masyarakat biasa, keterlibatannya dalam proses-proses politik cenderung kurang diperhitungkan (Sastroadmodjo, 1995).

Dalam sistem demokrasi daulat tertinggi dalam politik berada ditangan rakyat. Daulat tersebut dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan, masa depan bersama, serta menentukan atau memilih orang-orang yang akan duduk sebagai representasi dari suara rakyat itu sendiri baik itu ditingkat legislatif maupun eksekutif pada level lokal maupun nasional. Keterlibatan masyarakat dalam politik secara langsung seperti yang disebutkan sebelumnya merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal

tersebut dikarenakan, teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakatlah yang paling mengerti dan mengetahui apa yang mereka kehendaki (Mas' oed, 2003).

Dewasa ini partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat dapat disalurkan dalam berbagai bentuk, tidak hanya memberikan dukungan terhadap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun juga ikut menentukan siapa yang akan menjadi pengurus pemerintah atau pimpinannya (Budiarjo, 2009). Partisipasi politik juga dapat dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk-bentuk seperti, buah pikiran, dana, tenaga, maupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi politik kemudian juga diartikan sebagai usaha masyarakat terlibat dalam suatu kegiatan yang dituangkan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan (Mardijono, 2008).

Ada beberapa bentuk partisipasi politik yang dijelaskan oleh Sulaiman (dalam Miaz, 2012) yaitu: (1) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; (3) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; dan (4) partisipasi dalam bentuk dukungan. Sedangkan jenis-jenis partisipasi politik menurutnya adalah: (1) partisipasi pikiran (*psychological participation*); (2) partisipasi tenaga (*physical participation*); (3) partisipasi pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*); (4) partisipasi keahlian (*participation with skill*); (5) partisipasi barang (*material participation*); dan (6) partisipasi uang/dana (*money participation*).

Sementara Almond menjelaskan secara umum ada dua bentuk partisipasi politik yaitu partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional yaitu voting, diskusi politik, ikut kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individual baik dengan pejabat pemerintah maupun politik. Sedangkan, bentuk partisipasi politik non-konvensional adalah pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, melakukan kekerasan politik terhadap harta benda: perusakan, pemboman, pembakaran; serta tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi (Mas'ood, 2008).

Partisipasi politik masyarakat sering dilakukan dalam beberapa momen-momen politik tertentu seperti Pemilihan Umum (Pemilu) baik ditingkat daerah maupun pusat. Sebagai salah satu indikator penting dari suksesnya penerapan demokrasi di suatu negara, maka pelaksanaan pemilu harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya berarti keberadaan pemilu sebagai salah satu indikator penting bagi jalannya demokrasi dalam suatu negara harus dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan warga negara. Joko Prihatmoko dalam penjelasannya mengenai makna dari pemilu mengatakan, bahwa jika dalam pemilu memenuhi tiga kriteria yaitu keterbukaan, ketepatan, dan keefektifan, maka pemilu tersebut dapat disebut sebagai pemilu yang bermakna (Prihatmoko, 2008) Dengan dilaksanakannya pemilu diharapkan dapat menjadi fungsi untuk memberikan pendidikan politik yang bersifat massal dan terbuka kepada masyarakat, serta dapat menimbulkan pendewasaan politik dan pencerdasan politik terhadap masyarakat. Pemilu juga dapat membangkitkan kesadaran

masyarakat terhadap demokrasi serta infrastruktur dan mekanisme demokrasi yang baik. Pemilu juga kemudian diharapkan dapat mewujudkan kesadaran dalam masyarakat mengenai fungsi pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintahan secara teratur (Haris, 1988).

Di Indonesia kegiatan pemilihan umum pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilihan umum tahun 1955 tersebut dilaksanakan dengan sistem yang proporsional yang berlangsung dalam suasana demokratis. Pemilihan umum 1955 diawali dengan mulai terbentuknya partai-partai politik yang diprakarsai oleh para pemimpin politik di Indonesia berdasarkan maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Indonesia pada saat itu yaitu Mohammad Hatta. Maklumat tersebut berisi anjuran untuk membentuk partai-partai politik dan keinginan pemerintah Indonesia pada saat itu untuk melaksanakan pemilihan umum (KPU, 2008). Adapun butir-butir dari maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 tersebut adalah.

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat. Pemilihan ini diharapkan dapat dilakukan pada bulan Januari 1946.

Feith (2009) menjelaskan bahwa tujuan maklumat yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta tersebut adalah untuk menyediakan representasi langsung untuk semua kelompok penting dalam masyarakat Indonesia berdasarkan sistem perwakilan yang proporsional.

Pada saat pelaksanaan pemilu 1955 Indonesia patut berbangga karena mendapat pujian dari negara-negara asing. Pujian tersebut bukan tanpa sebab, selain telah berhasilnya Indonesia melaksanakan salah satu indikator dari demokrasi yaitu pemilu yang juga pertama kali dilaksanakan, juga yang menjadi kebanggaan adalah suksesnya pelaksanaan pemilu 1955 dengan aman, lancar, jujur, adil serta sangat demokratis. Pada pemilu tersebut uforia keterlibatan warga negara dalam kontestasi pemilu atau antusiasme dari warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik dapat dikatakan cukup baik, melihat yang menjadi peserta pemilu pada saat itu tercatat sebanyak 30-an partai politik dan lebih dari seratus kumpulan dan calon perorangan (KPU, 2008).

Pada saat pemilu tahun 1955, dapat dikatakan hampir seluruh elemen masyarakat terlibat didalamnya. Jika dilihat dari partai-partai politik dan kelompok-kelompok yang menjadi peserta pemilu, dapat disimpulkan bahwa partai-partai dan kelompok-kelompok tersebut merupakan perwakilan hampir dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Termasuk didalamnya kelompok seniman yang tergabung didalam organisasi yang bernama Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Lekra merupakan organisasi kebudayaan yang bertujuan sebagai wadah perjuangan untuk melawan imprealisme melalui pengembangan kebudayaan nasional yang bersifat kerakyatan. Di zaman orde baru, bentuk partisipasi politik

yang dilakukan kemudian berubah akibat adanya larangan dari pemerintah orde baru. Seniman dilarang berpolitik praktis, keterlibatan seniman dalam politik hanya sekedar sebagai penghibur pada momen-momen politik dan sama sekali tidak memiliki daya tawar. Dapat dikatakan kepentingan seniman pada saat itu sama sekali tidak dipertimbangkan (Afriady, 2015).

Namun, semenjak reformasi pada tahun 1998 di Indonesia bergulir, keterlibatan seniman dalam politik mulai terlihat aktif. Keterlibatan aktif para seniman dan kelompok seniman ini dilakukan dalam berbagai bentuk seperti ikut memeriahkan kampanye sebagai pendulang suara bagi partai politik dan lain sebagainya. Fenomena tersebut terjadi terutama pada saat pemilu tahun 2014 baik di tingkat pusat maupun daerah. Di level pusat keterlibatan seniman dan kelompok seniman dalam pemilu dibuktikan dengan hadirnya Slank sebagai pendukung Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014. Partisipasi politik Slank dalam Pilpres 2014 dilakukan dengan cara mengadakan konser “Salam 2 Jari” yang menghadirkan 200 pengisi acara yang diklaim gratis sebagai bentuk dukungan yang diberikan kepada pasangan Capres-cawapres tersebut (Irwansyah, 2014). Sementara dilain pihak, seniman Ahmad Dhani yang merupakan pentolan band Dewa 19 mendukung pasangan Capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Partisipasi politik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani dengan cara membuat video klip lagu pendek yang diberi judul “Prabowo-Hatta, We Will Rock You”. Hal tersebut tidak hanya dilakukan

sendiri oleh Ahmad Dhani, namun juga melibatkan tiga seniman jebolan Indonesian Idol yaitu Husein Alatas, Virzha dan Nowela (Irwansyah, 2014).

Tidak hanya di level pusat, di level daerah keterlibatan kelompok seniman dalam politik juga terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Pada tahun 2014 di Banda Aceh beberapa seniman yang berasal dari beberapa kelompok seni ikut terlibat aktif dalam politik yang dilakukan dalam berbagai bentuk seperti ikut memilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), mengikuti kegiatan kampanye dan berbicara atau melakukan diskusi politik. Seperti yang dilakukan oleh dua orang seniman Kota Banda Aceh yang juga selaku pemimpin kelompok Sanggar Rampagoe dan Sanggar Geunaseh. Partisipasi politik yang dilakukan oleh kedua seniman tersebut dengan cara ikut aktif terlibat pada Pemilihan Legislatif di Banda Aceh tahun 2014 dengan datang langsung ke TPS guna memilih calon legislatif pilihannya. Tidak hanya sampai disitu, para seniman yang tergabung dalam kelompok seni di kota Banda Aceh juga ikut terlibat dalam proses kampanye yang dilakukan oleh partai-partai peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014, komunitas seni tersebut yaitu Komunitas Drummer dan Perkusi Aceh (Afriady, 2015).

Hal yang sama juga terjadi di Kota Yogyakarta dimana para seniman melakukan partisipasi politik melalui karya seni budaya mereka, yang pada dasarnya hal tersebut berupa aspirasi dan pesan terhadap kondisi sosial politik yang terjadi di Kota Yogyakarta. Selama ini partisipasi politik yang dilakukan oleh para seniman di Kota Yogyakarta terlihat sangat aktif. Hal ini kemudian dibuktikan dengan gerakan kritik yang dilakukan oleh para seniman tersebut

menanggapi isu terkait *Jogja Ora Didol*, *Jogja Assat* dan *Festival Mencari Haryadi* (Zulpandi, 2017). Kemudian, partisipasi politik yang dilakukan oleh para seniman Kota Yogyakarta yaitu Folk Mataram Institute (FMI) ditunjukkan dengan cara memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Ada beberapa bentuk dukungan yang diberikan oleh FMI terhadap pasangan Jokowi-JK yaitu: (1) melakukan Kirab Budaya dan Deklarasi Jogja Istimewah untuk Jokowi-Jk; (2) dukungan melalui karya lagu dari salah satu anggota FMI yang berjudul *Ayo Lawan*; dan (3) melakukan kampanye sosial media terhadap pasangan Jokowi-JK yang dilakukan oleh para anggota FMI (Zulpandi, 2017).

Pada Pemilu Pilkada Tingkat II tahun 2015 di Kota Palu, keterlibatan seniman Kota Palu khususnya seniman yang tergabung dalam kelompok seni tradisi, atau dalam kata lain seniman-seniman yang mengeluarkan karya-karya berbasis nilai-nilai kebudayaan lokal baik dalam bentuk pertunjukan maupun rupa. Keterlibatan kelompok-kelompok seniman tradisi ini tidak dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memilih salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu yaitu pasangan Hidayat-Sigit. Kelompok seniman tradisi Kota Palu juga ikut terlibat aktif dalam kegiatan kampanye, tidak hanya terlibat sebagai *voter gaters* dalam bentuk pengisi acara atau penghibur pada panggung kampanye, namun juga terlibat sebagai perantara untuk memperkenalkan pasangan tersebut atau dalam kata lain ikut membantu mensosialisasikan pasangan yang didukung kepada kelompok seniman lainnya di Kota Palu. Selain itu, kelompok seniman yang mendukung salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu melalui perwakilannya bergabung sebagai tim kampanye atau pemenang salah satu



pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu tersebut. Kelompok-kelompok seniman tradisi tersebut juga sudah menjalain komunikasi dengan pasangan yang didukung tersebut semenjak pasangan tersebut belum memutuskan untuk mengikuti kontestasi pada Pemilukada Tingkat II Kota Palu tahun 2015.

Keterlibatan kelompok seniman Kota Palu tersebut tentu bukan tanpa alasan. Secara umum alasan keterlibatan aktif para kelompok seniman tradisi Kota Palu tersebut dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2015 dikarenakan adanya kesamaan isu atau visi yang akan diwujudkan kedepan apabila pasangan yang didukung terpilih sebagai Kepala Daerah di Kota Palu.

Hal ini menjadi menarik untuk dibahas, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa selain memiliki keterlibatan yang sangat signifikan dan dilakukan kelompok seniman tersebut dalam berbagai bentuk, hal ini menjadi fenomena yang baru dalam politik di Kota Palu. Dalam kajian Pemilu, salah satu cara untuk mengetahui alasan dibalik pilihan seorang warga negara terhadap salah satu kandidat atau partai tertentu adalah menggunakan teori perilaku pemilih. Mariam Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa perilaku pemilih adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam politik dengan cara memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Secara garis besar ada 3 pendekatan yang digunakan dalam teori perilaku pemilih guna mengetahui alasan dibalik penentuan pilihan seseorang yaitu: (1) Pendekatan Sosiologis; (2) Pendekatan Psikologis; dan (3) Pilihan Rasional.

Berdasarkan fenomena diatas, oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mencari tau bagaimana keterlibatan aktif kelompok seniman di kota Palu dilihat dari bentuk partisipasi politik yang mereka lakukan dalam mendukung salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu dan alasan dibalik pilihan kelompok seniman tersebut untuk mendukung salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu pada Pemilukada 2015 di kota Palu.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik kelompok seniman di Kota Palu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2015?
2. Alasan partisipasi politik kelompok seniman Kota Palu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2015?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau bagaimana bentuk partisipasi politik dan alasan-alasan yang mempengaruhi dukungan kelompok seniman Kota Palu terhadap salah satu calon Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Palu tahun 2015.

## b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian untuk memberikan gambaran dan pengetahuan bagi pemerintah akademisi, politisi, masyarakat secara umum bahwa tingkat partisipasi politik dari seluruh elemen masyarakat sangat berperan penting untuk mengakomodir kepentingan yang ingin diwujudkan. Salah satu caranya adalah, seperti yang dilakukan oleh kelompok seniman di Kota Palu dengan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu dilakukan dalam berbagai bentuk. Kemudian penelitian ini bisa menjadi pemicu awal munculnya penelitian-penelitian lain terkait keterlibatan aktif seniman dan kelompok seni di Kota Palu dalam politik yang mengingat fenomena tersebut belakangan ini cukup sering terjadi.